

KOMUNIKASI BENCANA SEBAGAI SEBUAH SISTEM PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA

¹Fetty Arisandi K, ²Choirul Umam

^{1,2}Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma

¹fetty@staff.gunadarma.ac.id,²choirul_umam@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis komunikasi bencana yang terjadi dalam proses manajemen bencana. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, untuk pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi literatur dari jurnal-jurnal dan berbagai sumber referensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penanganan bencana. Manajemen bencana seharusnya mencakup komponen mitigation, preparedness, response dan recovery, selain itu terdapat aspek penting yang perlu menjadi perhatian yaitu informasi, koordinasi dan kerjasama. Sistem komunikasi yang perlu dilakukan dalam penanganan bencana adalah sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana atau tahap pemulihan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah sebagai pusat koordinasi dan informasi, pihak swasta, LSM atau Organisasi sejenis beeguna sebagai pendukung pemerintah kemudian media sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam mengatur arus informasi dan masyarakat sebagai pihak yang melaksanakan sistem yang dibuat.

Kata Kunci: *Bencana, Koordinasi, Komunikasi, Manajemen, Sistem*

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the communication of disasters that occur in the process of disaster management. This research was conducted with qualitative methods, for data collection carried out by interview and literature study from journals and various reference sources. The results of the study concluded that communication is an inseparable part of disaster management. Disaster management should include mitigation, preparedness, response and recovery components, in addition there are important aspects that need attention: information, coordination and cooperation. The communication system that needs to be done in handling disasters is before, during and after a disaster or recovery phase. The process is carried out by involving various parties such as the government as the center of coordination and information, the private sector, NGOs or other similar organizations as supporters of the government and then the media as the party that assists the government in regulating the flow of information and the community as the party implementing the system created.

Keywords: *Coordination, Communication, Disaster, Management, System*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara rawan bencana, hal ini karena wilayah geologinya yang berada pada lokasi cincin api pasifik dan pertemuan tiga lempeng benua yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Cincin Api Pasifik merupakan daerah yang memiliki banyak sesar atau zona rekahan yang memanjang sekitar 40 ribu kilometer mulai dari Chile, Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara. (kumparan.com diakses pada 28 Juli 2019)

Kondisi wilayah yang demikian mengakibatkan Indonesia sering terjadi bencana alam. Kejadian bencana yang terjadi di Indonesia terdiri dari beberapa ancaman, menurut rencana nasional penanggulangan bencana tahun 2010-2014 (2010), yaitu:

Ancaman Gempa Bumi

Kondisi Indonesia yang terletak dipertemuan tiga lempeng, ketiga lempeng lambat laun bergerak dan saling bertumbukan dan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung aktif disepanjang wilayah pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusatenggara.

Ancaman Tsunami

Tsunami terjadi apabila terjadinya interaksi lempeng tektonik yang menimbulkan deformasi dasar laut sehingga terjadi gempa bumi dan gelombang besar di laut.

Ancaman Letusan Gunung Api

Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung api dengan 129 diantaranya aktif. Gunung-gunungapi aktif yang tersebar di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara dan Kepulauan Maluku merupakan sekitar 13% dari sebaran gunung api aktif dunia.

Ancaman Banjir

Kondisi negara Indonesia yang memiliki iklim tropis, sehingga memiliki dua musim. Kondisi yang demikian dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya ancaman-ancaman yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir dan kekeringan.

Ancaman Erosi

Erosi adalah perubahan bentuk tanah dan batuan yang disebabkan oleh air. Erosi dapat mengakibatkan penipisan tanah, penurunan tingkat kesuburan, mempengaruhi fungsi dan usia bendungan.

Ancaman Gelombang ekstrim dan Abrasi

Hal ini diakibatkan gelombang ekstrim siklon tropis di pantai.

Ancaman Cuaca Ekstrim

Karena terdapat perubahan iklim global, Indonesia juga mempengaruhi di Indonesia. Angin putting beliung, topan dan

badai tropis, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya atap bangunan yang ringan, baliho dan tiang-tiang listrik.

Bencana alam dipandang sebagai situasi yang menciptakan tantangan dan masalah terutama yang bersifat kemanusiaan. Sebuah bencana dapat disebabkan oleh alam maupun atas perbuatan manusia. Bencana alam dibagi menjadi tiga jenis Manesh (2017) yaitu: bencana hidrometeorologis, bencana geospasial, bencana biologis.

Bencana hidrometeorologis yaitu proses alami atau fenomena di atmosfer, hidrologi atau berhubungan dengan kelautan yang dapat menyebabkan kematian atau cedera, atau kerusakan property, gangguan sosial dan ekonomi atau degradasi lingkungan, yang termasuk bencana ini adalah banjir, gelombang laut, badai, longsor salju, kekeringan dan bencana yang terkait suhu ekstrim dan kebakaran hutan atau semak belukar.

Bencana geospasial yaitu proses alami atau fenomena yang mengakibatkan kematian dan cedera, kehilangan tempat tinggal, gangguan ekonomi dan sosial dan

degradasi lingkungan. Contoh yang termasuk kedalam bencana geospasial adalah: gempa bumi, tanah longsor, dan gunung berapi

Bencana biologis adalah proses yang berasal dari organik atau yang ditimbulkan oleh faktor biologis, termasuk paparan patogen (penyakit), mikroorganisme, racun, dan zat bioaktif. Hal ini dapat mengakibatkan kematian atau cedera, kerusakan rumah, gangguan sosial dan ekonomi atau degradasi lingkungan. Contoh yang termasuk kedalam bencana ini adalah: epidemi, wabah serangga atau binatang.

Selama sepuluh tahun terakhir banyak bencana yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data dari BNPB bencana yang terjadi didominasi oleh bencana banjir, puting beliung dan longsor. Tahun 2018, telah terjadi 1.113 kejadian puting beliung, 871 kejadian banjir, 615 kejadian tanah longsor, 130 kejadian kekeringan, 58 letusan gunung api, 53 kejadian gelombang pasang atau abrasi, 28 kejadian gempa bumi, 1 kejadian tsunami, dan 1 kejadian gempa bumi total kejadian bencana selama 2018 sebanyak 3.397 kejadian. (bnpb.cloud/dibi/laporan5 diakses pada 28 Juli 2019)



Gambar 1. Tren Bencana 10 Tahun Terakhir
(Sumber: bnpb.cloud/dibi/laporan5 diakses pada 28 Juli 2019)

Dampak dari bencana tersebut juga berdasarkan data BNPB, terdapat 3.874 total korban meninggal dan hilang, 21.171 mengalami luka-luka, 56.3135 mengalami terdampak dan mengungsi, kerusakan rumah yang lebih dari ratusan ribu, kemudian 287 unit fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, 1.503 unit fasilitas peribadatan mengalami kerusakan, dan 2984 unit fasilitas Pendidikan yang juga mengalami kerusakan. (bnpb.icloud/dibi/laporan5 diakses 28 Juli 2019). Kendala yang muncul dalam menangani bencana, menurut Menteri sosial Chamsah yang menjabat dari tahun 2001-2009 dalam Susanto (2011) adalah:

1. Intensitas dan kapasitas bencana yang semakin meningkat, dimana beberapa peristiwa bencana dengan skala besar seringkali berada diluar jangkauan pelayanan, sebagai akibat faktor lokasi dan rusaknya infrastruktur sistem penanggulangan bencana.
2. Keterbatasan potensidan sistem sumber yang dapat diidentifikasi dan didayagunakan pada saat bencana, sebagai akibat miskinya budaya kita dalam membuat perencanaan kontingensi bencana
3. Lemahnya koordinasi lintas sektoral (ego sektoral) baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota

4. Keterbatasan dana *on call* yang dapat sewaktu-waktu dipergunakan
5. Sistem birokrasi dan administasi yang kurang kondusif berkaitan otonomi daerah
6. Keterbatasan SDM terlatih dalam penanggulangan bencana

Sampai saat ini bencana alam merupakan fenomena yang sulit diprediksi kedatangannya. Kondisi penanganan bencana di Indonesia pada prakteknya masih dirasakan kurang maksimal dari segi pengaturan informasi, koordinasi dengan pihak relawan, masyarakat, dan berbagai instansi, kemudian cara merespon bencana dan mengatasi setelah bencana dan cara kesiapsiagaan respon bencana ketika akan menghadapi sebuah bencana.

Kata respon bencana menurut panduan perangkat dan layanan respon bencana di Asia dan Pasifik adalah penyediaan bantuan atau intervensi selama atau segera setelah bencana untuk menjaga kelangsungan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi orang-orang yang terkena dampak. Sedangkan arti kesiapsiagaan respon bencana yaitu aktivitas-aktivitas sebelum bencana yang dilakukan untuk meminimalkan hilangnya nyawa, cedera atau kerusakan propertidalam sebuah bencana, dan untuk memastikan bahwa penyelamatan, bantuandarurat, rehabilitasi, dan layanan-layanan lain dapat disediakan menyusul setelahterjadinya bencana tersebut.

Kesiapsiagaan untuk melakukan respon pertama dan segera disebut “kesiapsiagaan darurat. (UN Office for the Coordination of Humanitarian, n.d.)

Simonović (dalam HH, 2012) mengemukakan mengenai pendekatan sistem dalam manajemen bencana, bahwa manajemen bencana terintegrasi adalah proses pengambilan keputusan yang terus menerus yang mengacu pada pencegahan, respon dan pemulihan dari suatu peristiwa bencana. Manajemen bencana dapat didefinisikan secara sederhana sebagai cara untuk mengambil tindakan segera dan tepat untuk mengatasi bencana, komponen serta konsekuensinya dengan kondisi dibawah tekanan waktu, ancaman bahaya yang membayangi serta kurangnya informasi yang memadai dan akurat. Tindakan semacam itu perlu direncanakan. Kurangnya perhatian dan gagalnya menyusun rencana yang tepat dengan cara ilmiah maka akan mengarah kepada krisis yang dapat mengakibatkan kehancuran lembaga dan sistem.

Permasalahan utama dari manajemen bencana adalah sistem komunikasi yang terjadi di wilayah bencana belum memiliki cara yang optimal untuk menghasilkan sebuah arus informasi yang dapat dipergunakan dalam suatu kejadian bencana. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan

dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok, dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana.

Menurut panduan Rencana Nasional penanggulangan bencana 2010-2014 (2010), Isu yang tidak kalah pentingnya adalah belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif. Setiap terjadi bencana siapa berbuat apa belum jelas, masih sangat abu-abu. Semua ingin membantu, tetapi kadang kala tidak tahu apa yang dilakukan. Kinerja dari berbagai pihak yang belum optimal, koordinasi pemerintah setempat, pemangku adat, dan berbagai pihak lainnya masih belum dalam posisi koordinasi dan kerjasama yang optimal. Usaha pemulihan dampak bencana seperti informasi tentang korban jiwa, akses lokasi yang sulit, infrastruktur yang rusak, dan fasilitas vital yang juga mengalami kerusakan belum tertangani dengan maksimal ketika terjadinya bencana.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Susanto (2011) Sesungguhnya, melalui berbagai Lembaga subordinat kuasa negara, pemerintah sudah menjalankan manajemen bencana, tetapi akan lebih baik lagi jika membentuk jaringan komunikasi integratif bersifat kesetaraan yang melibatkan Lembaga swasta dan masyarakat di Kawasan bencana. Kendati demikian,

pemerintah harus berperan sebagai poros informasi bencana yang bisa dipercaya oleh semua pihak.

Beberapa penelitian yang membahas tentang manajemen bencana yang dilakukan oleh Lestari, Prabowo & Wibawa (2012) menyatakan penilaian kondisi darurat dilakukan dengan cara komunikasi kelompok dengan cara mengumpulkan berbagai informasi secara sistematis yang dilakukan oleh berbagai elemen perangkat masyarakat dimulai dari RT/RW, desa, kecamatan, kelurahan. Penilaian yang dilakukan dengan cara melihat kondisi korban dan lingkungannya. Komunikasi yang berlangsung dengan berbagai pihak yang terkait dijadikan sebuah monitoring untuk dapat membantu perencanaan program bantuan untuk masyarakat.

Penelitian lain yang membahas manajemen komunikasi pada bencana, penelitian ini dilakukan oleh Lestari, Sembiring, Prabowo, Wibawa & Hendariningrum (2013) dalam penelitian ini menyatakan bahwa diperlukannya koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terkait di wilayah bencana, kemudian dibuatnya SOP yang mengatur langkah atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia mengenai bencana dan telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis sistem komunikasi bencana yang

dilakukan di wilayah Indonesia, dengan harapan dapat dijadikan panduan dalam membuat standarisasi dalam penanganan bencana di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2004) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau juga dengan penemuan-penemuan yang tidak dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara dengan batasan kriteria sebagai berikut : (1) Konsep Komunikasi Bencana (2) Sistem Penanganan Bencana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Sistem Manajemen Bencana

Coppola dan Maloney (dalam HH, 2012) menyatakan bahwa manajemen bencana modern secara komprehensif mencakup empat komponen fungsional, yaitu:

1. **Mitigation**, yang mencakup reduksi atau mengeliminasi komponen resiko bahaya. Menurut World Development Reports (dalam Owolabi dan Ekechi, 2014), mitigasi melibatkan peninjauan kode bangunan, pemutakhiran analisis

kerentanan, penzanaan dan pengelolaan dan perencanaan penggunaan lahan, peninjauan peraturan penggunaan bangunan dan kode keselamatan, serta penerapan langkah-langkah pencegahan kesehatan. PAHO (2000) menambahkan bahwa mitigasi juga mensyaratkan mendidik komunitas bisnis tentang langkah yang harus diambil untuk mendiversifikasi lini bisnis sehingga meminimalkan kerugian ekonomi ketika terjadi bencana.

2. **Preparedness**, yang meliputi melengkapi masyarakat yang memiliki resiko terkena bencana atau menyiapkan agar mampu membantu orang pada peristiwa bencana dengan berbagai alat-alat/ perlengkapan untuk meningkatkan kemampuan bertahan dan meminimalisasikan resiko finansial serta resiko lainnya. Menurut World Health Organisation (2007), kesiapsiagaan adalah berbagai program pra-bencana yang memperkuat kemampuan personel, meningkatkan upaya teknis dan manajerial pemerintah, Internasional organisasi, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, media, badan ilmiah dan komunitas rawan bencana merespons dengan memuaskan situasi darurat dan bencana. Proses kesiapsiagaan antara lain meliputi perencanaan, pelatihan personil darurat, peringatan sistem, sistem komunikasi darurat, rencana evakuasi dan pelatihan, inventarisasi sumber daya, daftar kontak

personel darurat dan informasi publik (ISDR, 2008; Ulari, 2013)

3. **Response**, mencakup tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak bencana. Respon dan respon kegiatan terdiri dari memberikan peringatan dini kepada orang-orang di sekitar daerah rawan bencana, evakuasi korban, pencarian dan penyelamatan, penilaian dampak, logistik dan distribusi bantuan, mengamankan daerah dan orang-orang yang terkena dampak, rehabilitasi dan rekonstruksi (Hodgson dan Palm, 1992; Stephenson dan DuFranc, 2002)
4. **Recovery**, mencakup perbaikan, rekonstruksi atau mencapai kembali dari apa yang telah rusak/ hilang sebagai bagian dari bencana dan idealnya mengurangi resiko dari kekacauan yang sama dimasa depan. Tanggap bencana dan pemulihan adalah tindakan langsung keseluruhan yang diambil oleh pemerintah, lembaga dan profesional manajemen bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana sampai solusi yang lebih permanen dan berkelanjutan diselesaikan (Warfield, 2008; Khan dan Khan, 2008).

Keempat komponen tersebut yang saat ini menjadi platform dalam melakukan penanganan bencana, menjadi dasar untuk melakukan dari operasional lapangan sampai

ke pembuatan kebijakan dan strategi penanganan bencana.

Siklus Manajemen Bencana

Isu komunikasi dalam manajemen bencana yang dipaparkan oleh Shaw dan Gupta (2009:59) dalam HH (2012). Shaw dan Gupta lebih fokus menyoroti aspek komunikasi, namun sebenarnya ada implikasi lebih ketika kita menghubungkan antara siklus manajemen komunikasi dan aspek komunikasi, yaitu dimensi informasi, koordinasi dan kerjasama. Tahap sebelum kejadian bencana maka aspek komunikasi akan mencakup informasi yang akurat, koordinasi dan aspek kerjasama terutama kepada masyarakat yang rentan atas peristiwa bencana.

Tahap kejadian bencana keempat aspek : komunikasi, informasi, kerjasama dan koordinasi merupakan kunci sukses penanganan bencana, terutama untuk penanganan korban dan menghindari resiko lebih lanjut. Pada tahap setelah bencana rekonstruksi dan pemulihan pasca situasi bencana adalah tahap penting untuk membangun kembali korban bencana dan memastikan untuk mengurangi resiko apabila terjadi peristiwa serupa dikemudian hari. Hal yang sangat penting adalah mitigasi, dalam tahapan ini, seluruh potensi komunikasi menjadi penting untuk memastikan pencegahan dan pengurangan resiko, yang tentu pendekatan yang tepat adalah komprehensif, sistemik dan

terintegrasi antar lembaga, komponen maupun berbagai pihak yang ada.

Secara lebih luas, selain lembaga yang menangani bencana (BNPB), keterlibatan *stakeholder* seperti media, industri, politisi dan berbagai komponen masyarakat/ lembaganya menjadi sangat penting. Sedemikian penting agar keterlibatan mereka terutama pada peristiwa bencana dan juga pada mitigasi, tahap pemulihan, tidak digunakan sebagai ajang pencitraan – yang akhirnya menjadikan bencana dan korban bencana sebagai obyek semata, namun justru secara substansial memang membantu korban bencana dan meminimalisasi resiko yang ada/ yang akan terjadi.

Pemberitaan di media atas bencana letusan gunung Merapi di sisi lain juga sempat menunjukkan adanya tumpukan bantuan yang mubazir, karena tumpang tindih dan sistem informasi yang tidak baik, atau sebaliknya kejadian bencana gempa di Mentawai dan banjir di Wasior Papua, juga menunjukkan gambaran aspek komunikasi dan informasi yang belum bnerjalan dengan baik karena mengakibatkan keterlambatan penanganan, termasuk bantuan pada korban.

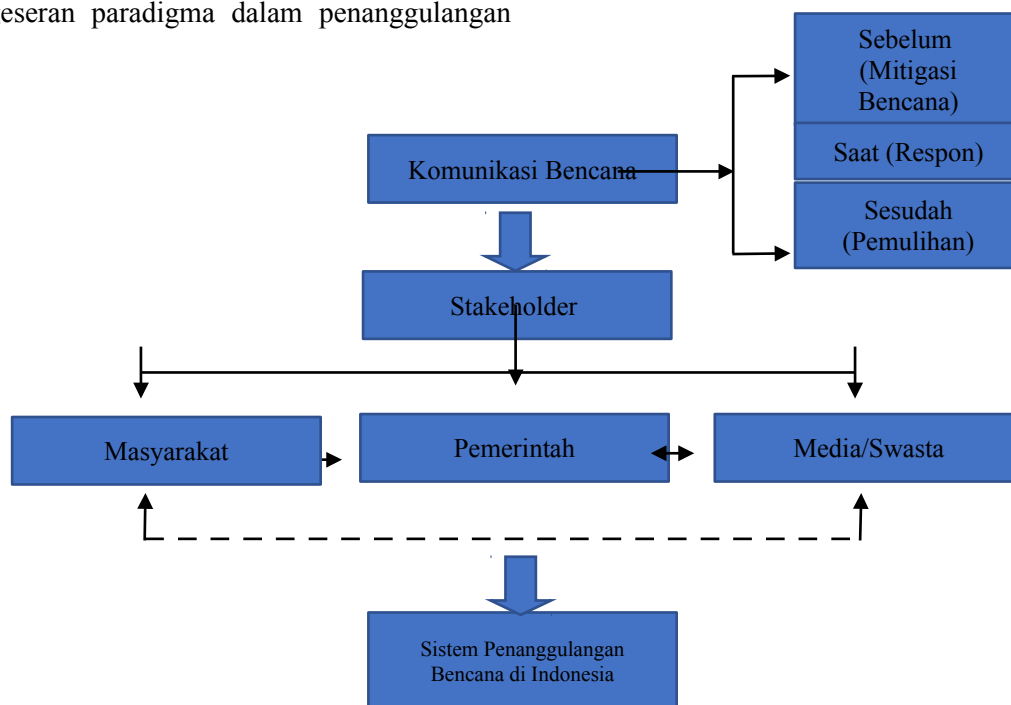
Komunikasi Bencana sebagai Sistem Penanganan Bencana di Indonesia

Komunikasi bencana sangat dibutuhkan dalam keadaan bencana dari mulai pra bencana, bencana terjadi dan pasca bencana. Komunikasi merupakan cara terbaik

yang dapat dilakukan guna mencapai kesuksesan dari proses penanggulangan bencana seperti mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan mengkomunikasikan berbagai macam pesan tentang bencana kepada publik baik pemerintah, media dan masyarakat dapat mengurangi resiko bencana, menyelamatkan nyawa dan dampak dari bencana tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah membawa pergeseran paradigma dalam penanggulangan

bencana dari hanya menanggapi situasi saat bencana terjadi (tanggap darurat) ke pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapat sebuah model komunikasi bencana dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Berikut model komunikasi menurut Jaelani (2019):



Gambar 3. Model Komunikasi Bencana

Berdasarkan model diatas dijelaskan bahwa komunikasi bencana sangat diperlukan dalam penanganan penanggulangan bencana di Indonesia dari mulai sebelum bencana (mitigasi bencana), saat bencana (respon), dan sesudah

bencana (pemulihan). Proses penanggulangan bencana di Indonesia ada beberapa stakeholder yang melibatkan meliputi pemerintah, masyarakat, media dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut memiliki peran masing-masing

dalam penanggulangan bencana khususnya media sebagai penyampai informasi dari lokasi bencana kepada publik. Selain itu, komunikasi menjadi elemen yang sangat penting dalam proses tersebut, sehingga komunikasi bencana dapat dijadikan sebagai sistem penanggulangan di Indonesia. Salah satu bencana dalam skala besar yang terjadi di Indonesia adalah tsunami dan gempa bumi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jeanne Branch Johnston dari University of Hawaii dengan judul *Personal Account From Survivor of the Hilo Tsunami 1946 and 1960: Toward A Disaster Communication Models*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengakuan personal para korban selamat dari bencana tsunami di Hilo pada tahun 1946 dan 1960. Penelitian ini menemukan bahwa pada bencana tsunami di Hilo tahun 1946 dan 1960 terjadi kesalahan prosedur dan koordinasi pemerintah dalam mengantisipasi bencana tsunami. Pihak berwenang dalam hal ini dinas pertahanan sipil, kepolisian di Hawaii dan Hilo mengalami miskomunikasi dan koordinasi sehingga pemberitahuan informasi kepada warga Hilo terlambat diberitakan. Selain itu ditemukan bahwa media massa melakukan kesalahan dalam menyampaikan berita kepada publik tentang tsunami. Media massa menyampaikan berita melalui radio di Hawaii bahwa tidak akan ada gelombang tsunami dalam satu jam ke depan. Kemudian dari data yang diperoleh menyatakan bahwa masyarakat Hawaii

memiliki pengetahuan yang sangat rendah tentang bencana tsunami. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu sebab banyaknya korban yang tewas pada dua bencana alam tersebut. Johnston (2013).

Penelitian di atas pernah terjadi di Indonesia yaitu tsunami Aceh. Tsunami Aceh merupakan salah satu bencana skala besar yang terjadi di Indonesia dan keadaan pemerintah, masyarakat dan media hampir sama dengan penelitian di atas. Sehingga penanggulangan bencana tsunami Aceh memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bencana sangat penting agar tidak adanya kesalahan informasi bencana yang akan disampaikan kepada masyarakat (publik), peran media massa yang sangat vital sebagai penyampai informasi dan pihak pemerintah dalam memutuskan kebijakan penanggulangan bencana yang terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi bencana dapat dijadikan sebuah pendekatan sistem dengan standar metode yang sudah dilakukan pada tindakan manajemen bencana. Tindakan komunikasi lebih ditekankan untuk menyamakan persepsi, penyampaian arus informasi, pengelolaan informasi dan mengontrol informasi. Sesuai dengan metode manajemen bencana yang diproses dari sebelum adanya bencana sampai proses pasca bencana komunikasi bencana masih terus berlanjut. Khususnya dalam

pengaturan arus informasi kepada pihak luar lokasi bencana dengan bantuan media.

Manajemen Bencana seharusnya mencakup komponen: a) *Mitigation*, yaitu mereduksi dan menghilangkan komponen dari resiko bahaya, b) *Preparedness*, yaitu melakukan persiapan kepada masyarakat mulai dari melengkapi peralatan sampai dengan memberikan pengetahuan berbagai hal terkait penanggulangan dan pertolongan bencana, c) *Response*, yaitu kegiatan untuk mengurangi dampak bencana yang dilakukan dengan cara memberitahukan informasi, memberikan pertolongan sampai dengan tahap mengamankan, d) *Recovery*, yaitu melakukan upaya pemulihan kondisi baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh berbagai komponen.

Siklus manajemen bencana terdapat aspek penting dalam komunikasi yaitu dimensi dimensi informasi, koordinasi dan kerjasama. Penanganan bencana diperlukan informasi yang akurat dalam rangka penanggulangan dampak yang timbulkan sehingga perencanaan yang sesuai dengan kondisi msyarakat yang terkena dampak, kemudian koordinasi sebagai aspek penting penunjang arus penyebaran informasi melalui komunikasi dan yang terakhir adalah kerjasama sebagai hal utama yang sangat diperlukan untuk pemulihan kondisi wilayah bencana.

Bentuk manajemen komunikasi bencana yang dibutuhkan di Indonesia adalah komunikasi yang dilakukan sebelum (mitigasi bencana), saat (respon), dan sesudah (pemulihan). Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen seperti masyarakat, kemudian pemerintah sebagai pemegang kepentingan utama dalam hal koordinasi, kemudian pihak lain yang dapat membantu melengkapi yaitu pihak swasta yang bisa diisi oleh berbagai LSM atau organisasi sejenis dan pihak media massa yang dapat membantu menyebarkan informasi lebih luas dan membantu pemerintah dalam mengatur informasi yang keluar dari wilayah bencana.

Pemerintah harus memiliki standar atau sistem pelaksanaan penanggulangan dan rehabilitasi bencana yang memperhatikan aspek kearifan lokal, dengan mendatangkan tenaga profesional yang tidak hanya ahli dalam teknis kebencanaan namun juga memperhatikan kondisi masyarakat di wilayah Indonesia yang masih mempertahankan budaya lokal turun-temurun, selain itu hal penting lainnya yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi lebih serius dalam pendataan jumlah warga yang memiliki kebutuhan khusus agar sistem manajemen bencana yang dibuat oleh pemerintah dapat dilakukan dengan maksimal oleh seluruh aspek lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2010). "Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014".
- HH. Setio Budi. 2012. Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama)". Universitas Atmajaya Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi*, 1 (4), Januari 2012
- Hodgson, M.E., & Palm, R. (1992). "Attitude towards Disasters: A GIS Design for Analysing Human Response to Earthquake Hazards, Geo-Information System". July-August, 41-51
- Johnston, J. B. (2003). *Personal Account from Survivor of the Hilo Tsunami 1946 and 1960: Toward A Disaster Communication Models*. University Of Hawaii Library.
- Khan, H. and Khan, A. (2008). "Natural Hazards and Disaster Management in Pakistan. In Munich Personal RePEC Archive. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/11052>
- Lestari, Puji. Prabowo, Agung. Wibawa, Arif. (2012). "Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat". Universitas Pembangunan Nasional. Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi* 10 (2), Agustus 2012, 173-197
- Lestari, Puji. Sembiring, Icha Dwi Putri Br. Prabowo, Agung. Hendariningrum, Retno. (2013). "Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 saat Tanggap Darurat". Universitas Pembangunan Nasional. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 10 (2), Desember 2013, 139-158
- Manesh, Amir Khorram. (2017). *Handbook of disaster and Emergency Management*. Sweden: University Gothenburg.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Owolabi dan Ekechi. (2014). Communication As Critical Factor In Disaster Management and Sustainable Development In Nigeria. *International Journal of Development and Economic Sustainability*
- Pan American Health Organization PAHO. (2000). *Natural Disasters: Protecting the Public's Health in Disaster Mitigation in the Health Sector*. <http://www.paho.org/english/ped/SP57504.pdf>
- Susanto. Eko Harry. (2011). Komunikasi Bencana. Mata Padi Presindo UN Office for the Coordination of Humanitarian. *Respon Bencana di Asia dan Pasifik: Panduan Perangkat dan Layanan Internasional*. n.d

Warfield, C. (2008). *The Disaster Management Cycle*. Accessed on 8/10/2013 <http://www.gdrc.org/uem/disasters/i-dm.cycle.html> World Health Organisation. 2007. *Risk Reduction and Emergency Preparedness*.

<https://bnpb.cloud/dibi/laporan5>
<https://kumparan.com/@kumparansains/memahami-cincin-api-pasifik-alasan-indonesia-rawan-gempa-dan-tsunami-1533295225512258121>